



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PERUBAHAN  
KECAMATAN KUALA BETARA  
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
KECAMATAN KUALA BETARA**

**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perubahan SKPD Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026), sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra Perubahan SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Betara Tahun Anggaran 2021-2026 merupakan Implementasi dari Rencana Strategik Kecamatan Kuala Betara dan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya, hal ini merupakan bagian dari upaya merealisasikan Misi Kecamatan Kuala Betara dalam satu waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Muara Deli, Juni 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGPINANG  
Kecamatan Kuala Betara  
KUALA BETARA  
TANJUNGPINANG



**H. HERRY PUTRA SYAM, SE**  
Pembina  
NIP. 19751118 200003 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUALA BETARA**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Pada Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan

### **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG USAHA**

### **BAB VIII : PENUTUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 dan mempedomi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dimana perangkat Daerah diharuskan menyusun Renstra Perangkat Daerah, maka Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Kuala Betara selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Betara Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Kuala Betara. Disamping itu, muatan Renstra Kecamatan Kuala Betara ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Betara yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kuala Betara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Revisi Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;

3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan serta Penyusunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Kuala Betara disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Kuala Betara.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, antara lain adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Kuala Betara bagi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan (lima tahun)

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan

masukan-masukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan identifikasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUALA BETARA**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Pada Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

## **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

## **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

## **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan

## **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

## **BAB VIII : PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN**

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

#### ***Tugas Kecamatan adalah :***

- Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan;

#### ***Camat mempunyai tugas ;***

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

#### ***Camat menyelenggarakan fungsi :***

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan oemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksnakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

***Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :***

- (1). Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, sekretaris camat mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan Penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Kecamatan ;
  - b. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan, aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
  - c. Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengorganisasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  - d. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum Kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

***Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :***

- (1). Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
  - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi , promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  - c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
  - d. Meministrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
  - e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
  - f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
  - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

***Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :***

- (1). Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;

- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. Melakukan penyusunan laporan kinerja instansi (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

***Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :***

- (1). Kepala Seksi Pemerintahan dan Keteriban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
  - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
  - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
  - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak-pajak retribusi dan pendapatan lainnya;
  - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan ;
  - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
  - g. Melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;

- h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. Melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

***Seksi Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :***

- (1). Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
  - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
  - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
  - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
  - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
  - f. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat;
  - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

***Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :***

- (1). Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
  - b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
  - c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
  - d. Membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

- e. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintah kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

***Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum Mempunyai tugas :***

- (1). Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauanserta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
  - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan da kebijakan pemerintah daerah;
  - c. Melakukan pelayanan umum timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum di bidang informasi sdan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
  - d. Membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
  - e. Melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
  - f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

***STRUKTUR ORGANISASI***

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kuala Betara saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian dan 4 Kepala Seksi.

Pemerintah Kecamatan Kuala Betara merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

***Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :***

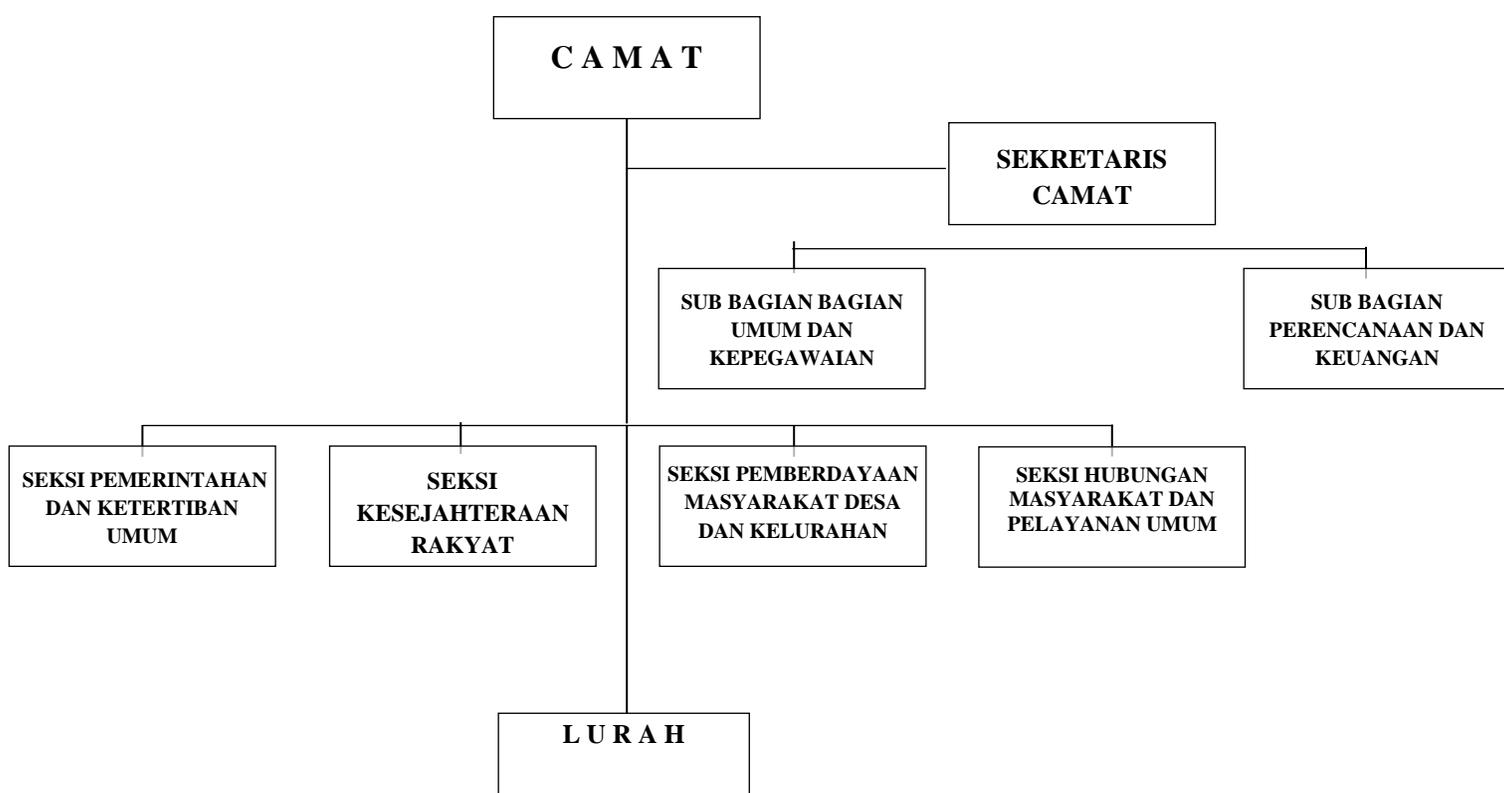
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan

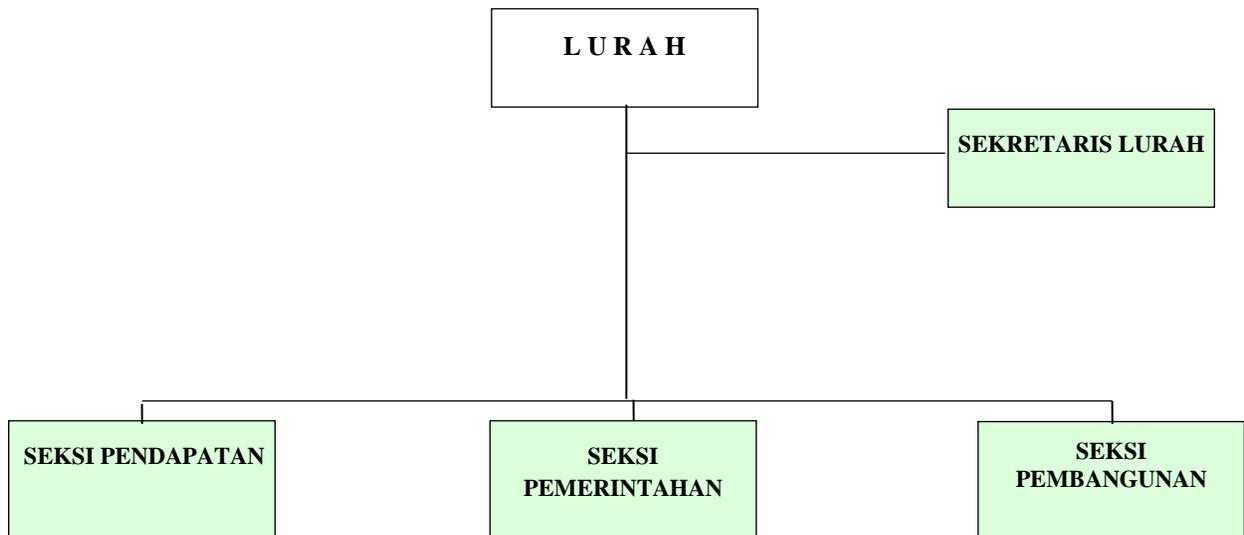
- f. Kelurahan terdiri atas:
1. Sekretariat Kelurahan;
  2. Seksi Pendapatan;
  3. Seksi Pemerintahan; dan
  4. Seksi Pembangunan

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disajikan dalam gambar 1.6

**Struktur Organisasi Kecamatan  
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat  
Nomor 71 Tahun 2016**



**Struktur Organisasi Kelurahan  
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat  
Nomor 71 Tahun 2016**



**1.2 SUMBER DAYA PADA KECAMATAN**

**1. Kondisi Umum Pegawai**

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 33 orang yang terdiri dari ASN, Tenaga Honorer, Penjaga kantor dan Petugas Kebersihan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.7.  
Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara

| No. | Pegawai                     | Jumlah (Orang) | %    |
|-----|-----------------------------|----------------|------|
| 1.  | Aparatur Sipil Negara (ASN) | 19             | 57,5 |
| 2.  | Tenaga Kerja Kontrak (TKK)  | 10             | 30,3 |
| 3.  | Penjaga Kantor              | 2              | 6,1  |
| 4.  | Petugas Kebersihan          | 2              | 6,1  |
|     | Jumlah                      | 33             | 100  |

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu tenaga Honorer dan Penjaga Kantor.

- a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perbub Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 19 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.8.

Tabel 1.8

Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2020

| No. | Jabatan/Staf            | Jumlah (orang ) | %     |
|-----|-------------------------|-----------------|-------|
| 1.  | Eselon III/a            | 1               | 5,26  |
| 2.  | Eselon III/b            | 1               | 5,26  |
| 3.  | Eselon IV/a             | 4               | 21,06 |
| 4.  | Eselon IV/b             | 5               | 26,31 |
| 5.  | Jabatan Fungsional Umum | 8               | 42,11 |
|     | Jumlah                  | 19              | 100%  |

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat dari 19 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan masih terdapat Jabatan yang belum terisi, terdapat 5,26 % pegawai yang berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 68,42 %, golongan II sebanyak 26,32 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.9

Tabel 1.9

Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2020

| NO | Golongan | Jumlah (orang ) | %     |
|----|----------|-----------------|-------|
| 1. | IV       | 1               | 5,26  |
| 2. | III      | 13              | 68,42 |
| 3. | II       | 5               | 26,32 |
|    | Jumlah   | 19              | 100%  |

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 yaitu sebesar 63,16 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTA sebesar 36,84 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.0

Tabel 2.0  
Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara Berdasarkan  
Pendidikan Tahun 2020

| N0 | Pendidikan       | Jumlah (orang ) | %     |
|----|------------------|-----------------|-------|
| 1. | Strata-2 ( S2 )  | -               | -     |
| 2. | Strata-1 ( S1 )  | 12              | 63,16 |
| 3. | Sarjana Muda/ D3 | -               | -     |
| 4  | SLTA/SMK         | 7               | 36,84 |
| 5  | SLTP             | -               |       |
|    | Jumlah           | 19              | 100%  |

d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat strata-1 sebesar 63,16 % yang terdiri dari 3 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara Berdasarkan Kesarjanaan

| N0 | Kesarjanaan/ Disiplin Ilmu | Jumlah (orang ) |
|----|----------------------------|-----------------|
| A. | Sarjana                    |                 |
|    | 1. Sospol                  | 7               |
|    | 2. Ekonomi                 | 4               |
|    | 3. Komunikasi              | -               |
|    | 4. Hukum                   | -               |
|    | 5. Teknik                  |                 |
|    | 6. Pendidikan              | 1               |
| B. | Sarjana Muda               | -               |
|    | Jumlah                     | 12              |

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kecamatan Kuala Betara

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian diharapkan kompetensi disiplin ilmu yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin berkualitas.

e. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Kuala Betara yang mendukung pelaksanaan tugas bisa terlihat dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel. 2.2

Sarana Kerja Kantor Kecamatan Kuala Betara dalam Kondisi Baik

| NO | URAIAN            | BANYAKNYA | SATUAN |
|----|-------------------|-----------|--------|
| 1  | Kendaraan Roda 4  | 1         | Unit   |
| 2  | Kendaraan Roda 2  | 12        | Unit   |
| 3  | Pompong           | 1         | Unit   |
| 4  | Meja Rapat        | 1         | Unit   |
| 5  | Meja Kerja        | 30        | Unit   |
| 6  | Kursi Kerja       | 49        | Unit   |
| 7  | Kursi Tamu (Sofa) | 3         | Unit   |
| 8  | Kursi Pelayanan   | 1         | Unit   |
| 9  | Lemari Arsip      | 8         | Unit   |
| 10 | Komputer          | 4         | Unit   |
| 11 | Laptop            | 6         | Unit   |
| 12 | Printer           | 3         | Unit   |
| 13 | Kamera            | 1         | Unit   |
| 14 | Kipas Angin       | 9         | Unit   |
| 15 | Radio SSB         | 1         | Unit   |
| 16 | Mesin Genset      | 4         | Unit   |
| 17 | Mesin Absen       | 1         | Unit   |
| 18 | Kursi Plastik     | 178       | Unit   |
| 19 | Sound System      | 3         | Unit   |
| 20 | Stabilizer        | 3         | Unit   |

### 2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Kuala Betara berdasarkan sasaran dan target Renstra atau Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Kuala Betara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang disajikan dalam tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Kuala Betara, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kuala Betara pada Tahun 2016 sebesar Rp. 623.634.100,- terealisasi sebesar Rp. 455.798.100,- pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.131.245.899,- terealisasi sebesar Rp. 973.507.400,-, pada Tahun 2018 sebesar Rp. 1.171.885.899,- terelisasi sebesar Rp. 1.111.630.699, pada Tahun 2019 sebesar Rp. 2.288.193.342,- terelisasi sebesar Rp. 1.459.831.844,- pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.590.531.242,- terelisasi sebesar Rp. 1.324.198.644,-. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari Tahun 2016-2021, selengkapnya dapat dilihat pada tabel T-C.24

Berdasarkan Tabel T-C.24 diketahui rasio capaian antara anggaran dan realisasi yang baik yaitu pada tahun 2016 – 2021 dengan rasio lebih dari 70%. Sementara untuk tahun 2019 rasio realisasi anggaran dibawah 70%. Hal ini disebabkan oleh adanya satu program Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan jumlah anggaran dengan nilai besar namun realisasinya kecil. Rendahnya penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut disebabkan oleh sempitnya range waktu dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri serta adanya faktor Cuaca dimana kegiatan dilaksanakan pada musim penghujan dan pasang ROB sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal.

### 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN

Kecamatan Kuala Betara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, hal ini dengan menggunakan metode Analisa SWOT. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Opportunity*

(Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal KEKUATAN (Strenghts)

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan.
3. Tersedianya sumber daya pegawai
4. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
5. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa dari tingkat Kabupaten.
6. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan.
7. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.

KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai.
3. Belum sinergisnya koordinasi diantara sektretariat dan seksi.
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana kerja.
5. Belum akuratnya data mata pencaharian penduduk .
6. Belum akuratnya data masyarakat menurut agamanya.
7. Belum akuratnya data klarifikasi umur penduduk .
8. Belum akuratnya data murid/siswa di seluruh tingkatan.
9. Belum akuratnya data jumlah perusahaan dan pelaku usaha.
10. Belum akuratnya data wajib KTP .
11. Belum akuratnya data administrasi pertanahan .
12. Belum akuratnya data potensi sumber daya ekonomi masyarakat.
13. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah .

B. Lingkungan Eksternal

1. Tersedianya potensi industri, UKM, sumber daya alam, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Tingginya peluang pasar
3. Meningkatnya sarana air bersih di masyarakat
4. Meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan perikanan

ANCAMAN (Threats) :

1. Masih kurang memadainya prasarana dan sarana (gedung dan meubeler) Kecamatan Kuala Betara
2. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah
3. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
4. Masih kurangnya pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat
5. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi
6. Adanya irigasi yang rusak serta kurangnya pemeliharaan sehingga mengganggu distribusi pasokan air bagi daya dukung pertanian
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan saluran irigasi secara rutin dan adanya penyempitan saluran/irigasi.
8. Belum optimalnya interkoneksi antar ruas jalan Kabupaten dan masih adanya jalan –jalan Desa yang masih berbatu dan tanah
9. Masih terbatasnya jumlah PJU serta adanya PJU yang mati/rusak
10. Masih ditemukannya pelaksanaan proyek oleh pihak ketiga yang kurang koordinasi serta hasilnya kurang optimal
11. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB
12. Sulitnya penagihan PBB terhadap WP yang berdomisili diluar daerah
13. Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan perangkat pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan
14. Tingginya tuntutan masyarakat akan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, pengairan serta lembaga pendidikan baik formal maupun informal
15. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman dan pelaksanaan Perda

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

2. Strategi W-O

- 2.1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
- 2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
- 2.3. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
- 2.4. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait

- 2.5. Meningkatkan penyediaan data yang akurat
- 2.6. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
- 2.7. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan

### 3. Strategi S-T

- 3.1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
- 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadukan berbagai program dan kegiatan.
- 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM)
- 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
- 3.5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
- 3.6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat
- 3.7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)

### 4. Strategi W-T

Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN**

##### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan uraian tugas tersebut, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

##### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2024 adalah **““MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024”**”.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah :

**Berkualitas** berarti peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang professional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.

**Ekonomi Maju** berarti memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang

terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

**Religius** berarti menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah social dan toleransi yang menjadi run dan pedoman bagi seluruh aktifitas masyarakat dan pemerintahan.

**Kompetitif** berarti menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.

**Aman** berarti peningkatan kualitas system keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

**Harmonis** berarti terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintahan pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayaann yang nyaman, harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan local sebagai kota bersama.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak.
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis.
3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Kuala Betara sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan misi

- 1) Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis;
- 2) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; dan
- 3) Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu :

- Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan tantibum linmas
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif dengan tolak ukur ketercapaian adalah salahsatunya persentase desa dengan nilai indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai “Baik”
- Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Dari banyak arah kebijakan Kemendagri yang tertuang dalam Renstra nya, ada beberapa arah kebijakan menyangkut kewilayahan seperti :

- Peningkatan insfrastruktur sarana/prasarana pendukung pemerintahan desa
- Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

- Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 sampai Tahun 2033, mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menempatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berrhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Pada lampiran IV Peraturan Daerah tersebut terdapat tabel indikasi program utama pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Kecamatan Kuala Betara diantaranya :

1. Pengembangan Kawasan Pendidikan (PAUD, TK, SD, dan SMP)
2. Pengembangan Puskesmas Pembantu
3. Pengembangan Pasar Desa
4. Pembangunan Minapolitan
5. Pengembangan Jaringan Prasarana Telekomunikasi

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021–2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Aspek Pelayanan; semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
2. Bidang Pertanahan; adanya potensi konflik social terkait pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat.
3. Aspek Lingkungan, adanya Perubahan dan alih fungsi lahan dan hutan
4. Bidang Pendidikan; masih rendahnya jumlah Guru PNS dan PPPK yang ada pada semua SD/SMP di Kec. Kuala Betara.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **Mewujudkan Kecamatan Kuala Betara yang Maju dalam Pelayanan menuju Masyarakat yang Berdaya dan Berbudaya.**

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel 4.1. berikut :

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kuala Betara**

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Kuala Betara menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Kuala Betara. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Kuala Betara selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Kuala Betara.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Kuala Betara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya ditentukan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut :

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 disampaikan pada tabel T-C 2.7 sebagai berikut:

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN**

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Kuala Betara berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel T-C 28 sebagai berikut.

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen peencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuala Betara serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran RJPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kuala Betara yang menjadi dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari renstra Kecamatan Kuala Betara.

Pelaksanaan Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Betara ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Kuala Betara, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pemangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Muara Deli, Juni 2022

  
CAMAT KUALA BETARA  
  
**H. HERRY PUTRA SYAM, SE**  
Pembina  
NIP. 19751118 200003 1 003

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**KECAMATAN KUALA BETARA**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan   | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Kecamatan Tahun ke- |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |      |      |      | Rasio Capaian Kecamatan Tahun ke- |      |      |      |      |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|
|    |   |             |            |                          | 2016                               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016                              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1  | 2   | 3           | 4          | 5                        | 6                                  | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                          | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                                | 17   | 18   | 19   | 20   |
| 1  | - Indeks Kepuasan Masyarakat  | -           | 78         | -                        | 70%                                | 72%  | 74%  | 76%  | 78%  | 70%                         | 75%  | 75%  | 80%  | 80%  | 100                               | 104  | 101  | 105  | 103  |
| 2  | - Persentase Keluhan/pengaduan masalah pelayanan administratif yang ditindak lanjuti  | -           | 100        | -                        | 100%                               | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100                               | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 3  | - Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan Program PHBS  | -           | 70         | -                        | 65%                                | 65%  | 70%  | 70%  | 70%  | 65%                         | 65%  | 70%  | 70%  | 70%  | 100                               | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 4  | - Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti  | -           | 100        | -                        | 100%                               | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100                               | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 5  | - Persentase Desa dan Kelurahan yang penilaian Kinerjanya diatas Skor 70  | -           | 100        | -                        | 90%                                | 90%  | 100% | 100% | 100% | 90%                         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100                               | 111  | 100  | 100  | 100  |
| 6  | - Persentase Desa/Kelurahan menerapkan anggaran berbasis kinerja  | -           | 100        | -                        | 90%                                | 90%  | 100% | 100% | 100% | 90%                         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100                               | 111  | 100  | 100  | 100  |
| 7  | - Persentase Rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban umum, Kesra, Pemberdayaan, Humas dan Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti dalam satu tahun berjalan | -           | 100        | -                        | 100%                               | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100                               | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 8  | - Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan   | -           | 90         | -                        | 90%                                | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 111                               | 111  | 111  | 111  | 111  |
| 9  | - Persentase sarana dan prasarana publik dibangun termanfaatkan/berfungsi baik  | -           | 100        | -                        | -                                  | -    | -    | 100% | 100% | -                           | -    | -    | 100% | 100% | -                                 | -    | -    | 100  | 100  |
| 10 | - Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti  | -           | 100        | -                        | 100%                               | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100                               | 100  | 100  | 100  | 100  |



**Tabel T-C 24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan**  
**KECAMATAN KUALA BETARA**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**TAHUN 2016 - 2020**

| Uraian   | Anggaran pada Tahun ke- |             |             |               |             | Realisasi anggaran pada Tahun ke- |             |             |             |             | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |        |        |        |        | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|--|-------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------|
|  | 2016                    | 2017        | 2018        | 2019          | 2020        | 2016                              | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2016  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | Anggaran              | Realisasi |
| 1  | 2                       | 3           | 4           | 5             | 6           | 7                                 | 8           | 9           | 10          | 11          | 12  | 13     | 14     | 15     | 16     | 17                    | 18        |
| - Pelayanan administrasi perkantoran   | 133,947,700             | 321,351,949 | 379,563,449 | 504,474,752   | 417,806,042 | 104,075,700                       | 314,520,050 | 358,069,449 | 468,935,552 | 321,576,042 | 77.70   | 97.87  | 94.34  | 92.96  | 76.97  | 43.43                 | 53.89     |
| - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 80,640,000              | 196,960,000 | 140,260,000 | 122,250,000   | 88,350,000  | 70,405,000                        | 160,812,400 | 133,909,000 | 118,316,500 | 64,967,000  | 87.31   | 81.65  | 95.47  | 96.78  | 73.53  | 18.72                 | 13.73     |
| - Peningkatan Disiplin aparatur  | 11,450,000              | 14,300,000  | 14,300,000  | 14,675,000    | -           | 11,450,000                        | 14,300,000  | 12,800,000  | 14,675,000  | -           | 100.00  | 100.00 | 89.51  | 100.00 | 0.00   | (18.12)               | (17.73)   |
| - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   | 10,000,000              | 19,000,000  | 27,000,000  | 25,000,000    | 2,650,000   | 10,000,000                        | 9,000,000   | 21,500,000  | 22,500,000  | 2,650,000   | 100.00  | 47.37  | 79.63  | 90.00  | 100.00 | 8.82                  | 11.32     |
| - Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman   | -                       | -           | -           | 1,140,138,000 | -           | -                                 | -           | -           | 370,000,000 | -           | 0.00  | 0.00   | -      | 32.45  | 0.00   | -                     | -         |
| - pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya                               | -                       | -           | -           | -             | 700,000,000 | -                                 | -           | -           | -           | 346,280,000 | 0.00  | 0.00   | -      | 0.00   | 0.00   | -                     | -         |
| - Pengembangan Wawasan kebangsaan  | -                       | -           | -           | 4,600,000     | -           | -                                 | -           | -           | 4,600,000   | -           | 0.00  | -      | -      | 100.00 | 0.00   | -                     | -         |
| - Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya | 87,600,000              | 100,560,000 | 127,538,500 | 29,872,500    | 21,600,000  | 87,600,000                        | 96,600,000  | 127,538,500 | 29,872,500  | 14,080,000  | 100.00  | 96.06  | 100.00 | 100.00 | 65.19  | (15.66)               | (21.78)   |
| - Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan                            | 21,650,000              | 139,100,950 | 113,100,950 | 97,014,354    | 48,750,000  | 21,650,000                        | 58,470,950  | 96,280,950  | 90,664,354  | 47,550,000  | 100.00  | 42.03  | 85.13  | 93.45  | 97.54  | 114.95                | 45.32     |
| - Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi  | -                       | 35,250,000  | 33,950,000  | 12,250,000    | 16,750,000  | -                                 | 33,175,000  | 33,800,000  | 12,000,000  | 12,375,000  | 0.00  | 94.11  | 99.56  | 97.96  | 73.88  | (7.90)                | (14.87)   |
| - Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga   | 79,795,000              | 128,736,000 | 128,736,000 | 155,950,000   | -           | 50,145,000                        | 121,142,000 | 128,736,000 | 155,950,000 | -           | 62.84   | 94.10  | 100.00 | 100.00 | 0.00   | (4.38)                | 17.24     |
| - Kerjasama Pembangunan  | 9,250,000               | 9,000,000   | 16,000,000  | 10,450,000    | -           | 9,250,000                         | 9,000,000   | 15,100,000  | 10,450,000  | -           | 100.00  | 100.00 | 94.38  | 100.00 | 0.00   | (14.90)               | (16.43)   |
| - Perencanaan Pembangunan Daerah   | 3,850,000               | 3,850,000   | 15,500,000  | 9,700,000     | 40,106,000  | 3,850,000                         | 3,850,000   | 15,500,000  | 9,700,000   | 40,106,000  | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 144.65                | 144.65    |
| - Keagamaan dan Kemasyarakatan   | 126,242,200             | 163,137,000 | 175,937,000 | 161,819,236   | 134,519,200 | 123,242,200                       | 152,637,000 | 168,397,000 | 152,169,236 | 25,486,602  | 97.62   | 93.56  | 95.71  | 94.04  | 18.95  | 3.04                  | (14.68)   |
| - Penataan Administrasi Kependudu-kan  | 59,210,000              | -           | -           | -             | -           | 53,730,000                        | -           | -           | -           | -           | 90.74   | -      | -      | -      | -      | -                     | -         |

**Tabel T-C 24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan**  
**KECAMATAN KUALA BETARA**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**TAHUN 2016 - 2020**

| URAIAN PROG/KEG   | Anggaran pada Tahun ke- |                    |                    |                    |                    | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |                    |                    |                    |                    | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |            |            |            |            | Rata-rata Pertumbuhan |            |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
|   | 2016                    | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2016                              | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2016  | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | Anggaran              | Realisasi  |
| 1   | 2                       | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                 | 8                  | 9                  | 10                 | 11                 | 12  | 13         | 14         | 15         | 16         | 17                    | 18         |
| <b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  | <b>133,946,900</b>      | <b>321,351,949</b> | <b>379,563,449</b> | <b>504,474,752</b> | <b>449,603,640</b> | <b>85,430,900</b>                 | <b>314,520,050</b> | <b>358,069,249</b> | <b>468,934,752</b> | <b>391,789,042</b> | 64  | 98         | 94         | 93         | 87         | 45                    | 74         |
| 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 900,000                 | 1,350,000          | 5,350,000          | 5,400,000          | 3,000,000          | 675,000                           | 1,350,000          | 5,070,000          | 5,400,000          | 3,000,000          | 75  | 100        | 95         | 100        | 100        | 76                    | 84         |
| 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik   | 22,500,000              | 32,100,000         | 35,700,000         | 34,860,000         | 24,460,000         | 18,750,000                        | 32,100,000         | 35,592,000         | 34,764,000         | 24,005,000         | 83  | 100        | 100        | 100        | 98         | 5                     | 12         |
| 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan   | 25,675,000              | 156,650,000        | 136,910,000        | 169,900,000        | 221,400,000        | 20,675,000                        | 156,603,000        | 136,910,000        | 161,100,000        | 198,000,000        | 81  | 100        | 100        | 95         | 89         | 138                   | 171        |
| 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor   | 7,757,000               | 14,906,299         | 14,906,299         | 18,924,421         | 27,754,170         | 6,757,000                         | 13,905,500         | 14,906,299         | 18,924,421         | 25,754,170         | 87  | 93         | 100        | 100        | 93         | 41                    | 44         |
| 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 5,118,300               | 23,653,750         | 27,655,250         | 49,385,315         | 49,628,970         | 5,118,300                         | 19,934,550         | 27,655,250         | 49,385,315         | 44,531,372         | 100   | 84         | 100        | 100        | 90         | 115                   | 99         |
| 6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 4,250,000               | 7,000,000          | 7,000,000          | 7,892,750          | 5,000,000          | 3,479,000                         | 5,368,000          | 6,997,000          | 7,892,750          | 5,000,000          | 82  | 77         | 100        | 100        | 100        | 10                    | 15         |
| 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor  | 1,196,600               | 1,791,900          | 1,791,900          | 1,752,266          | 1,820,500          | 1,196,600                         | 1,628,000          | 1,791,700          | 1,752,266          | 1,820,500          | 100   | 91         | 100        | 100        | 100        | 13                    | 12         |
| 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 6,000,000               | 12,000,000         | 12,000,000         | 8,100,000          | 4,050,000          | 5,000,000                         | 12,000,000         | 12,000,000         | 8,100,000          | 4,050,000          | 83  | 100        | 100        | 100        | 100        | 4                     | 14         |
| 9 Penyediaan Makanan dan Minuman  | 4,200,000               | 9,900,000          | 11,250,000         | 16,000,000         | 8,450,000          | 3,500,000                         | 9,900,000          | 11,250,000         | 15,200,000         | 3,450,000          | 83  | 100        | 100        | 95         | 41         | 36                    | 39         |
| 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah   | 56,350,000              | 62,000,000         | 127,000,000        | 192,260,000        | 104,040,000        | 20,280,000                        | 61,731,000         | 105,897,000        | 166,416,000        | 82,178,000         | 36  | 100        | 83         | 87         | 79         | 30                    | 71         |
| <b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | <b>80,640,000</b>       | <b>196,960,000</b> | <b>140,260,000</b> | <b>122,250,000</b> | <b>165,585,000</b> | <b>59,170,000</b>                 | <b>160,812,400</b> | <b>133,909,000</b> | <b>118,316,500</b> | <b>86,742,000</b>  | <b>73</b>                                     | <b>82</b>  | <b>95</b>  | <b>97</b>  | <b>52</b>  | <b>35</b>             | <b>29</b>  |
| 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional   | -                       | 18,000,000         | -                  | -                  | 20,000,000         | -                                 | 17,786,400         | -                  | -                  | -                  | -   | 99         | -          | -          | -          | -25                   | -25        |
| 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  | -                       | -                  | -                  | -                  | 7,500,000          | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -   | -          | -          | -          | -          | 0                     | 0          |
| 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor   | -                       | 3,600,000          | 40,500,000         | -                  | 35,900,000         | -                                 | 3,600,000          | 40,350,000         | -                  | -                  | 100   | 100        | -          | -          | -          | 231                   | 230        |
| 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor  | 11,000,000              | 22,000,000         | 22,000,000         | 26,600,000         | 44,835,000         | 10,000,000                        | 17,000,000         | 22,000,000         | 26,600,000         | 42,835,000         | 91  | 77         | 100        | 100        | 96         | 47                    | 45         |
| 5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional  | 62,040,000              | 147,960,000        | 72,360,000         | 72,250,000         | 57,350,000         | 41,570,000                        | 117,026,000        | 66,159,000         | 68,536,500         | 43,907,000         | 67  | 79         | 91         | 95         | 77         | 17                    | 26         |
| 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor  | 3,600,000               | 5,400,000          | 5,400,000          | 23,400,000         | -                  | 3,600,000                         | 5,400,000          | 5,400,000          | 23,180,000         | -                  | 100   | 100        | 100        | 99         | -          | 71                    | 70         |
| 7 Penyediaan Sewa Gedung Kantor   | 4,000,000               | -                  | -                  | -                  | -                  | 4,000,000                         | -                  | -                  | -                  | -                  | 100   | -          | -          | -          | -          | -25                   | -25        |
| <b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>   | <b>11,450,000</b>       | <b>14,300,000</b>  | <b>14,300,000</b>  | <b>14,675,000</b>  | <b>-</b>           | <b>11,450,000</b>                 | <b>14,300,000</b>  | <b>12,800,000</b>  | <b>14,675,000</b>  | <b>-</b>           | <b>100</b>                                    | <b>100</b> | <b>90</b>  | <b>100</b> | <b>-</b>   | <b>-18</b>            | <b>-18</b> |
| 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya   | 11,450,000              | 14,300,000         | 14,300,000         | 14,675,000         | -                  | 11,450,000                        | 14,300,000         | 12,800,000         | 14,675,000         | -                  | 100   | 100        | 90         | 100        | -          | -18                   | -18        |
| <b>IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   | <b>10,000,000</b>       | <b>19,000,000</b>  | <b>27,000,000</b>  | <b>25,000,000</b>  | <b>2,650,000</b>   | <b>10,000,000</b>                 | <b>9,000,000</b>   | <b>21,500,000</b>  | <b>22,500,000</b>  | <b>2,650,000</b>   | <b>100</b>                                    | <b>47</b>  | <b>80</b>  | <b>90</b>  | <b>100</b> | <b>9</b>              | <b>11</b>  |
| 1 Pengembangan SDM  | 10,000,000              | 19,000,000         | 27,000,000         | 25,000,000         | 2,650,000          | 10,000,000                        | 9,000,000          | 21,500,000         | 22,500,000         | 2,650,000          | 100   | 47         | 80         | 90         | 100        | 9                     | 11         |
| <b>V. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>                             | <b>-</b>                | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>780,000,000</b> | <b>-</b>                          | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>700,000,000</b> | <b>-</b>                                      | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>90</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>   |
| Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sosial dan Budaya  | -                       | -                  | -                  | -                  | 780,000,000        | -                                 | -                  | -                  | -                  | 700,000,000        | -   | -          | -          | -          | 90         | 0                     | 0          |
| <b>VI. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b> | <b>87,600,000</b>       | <b>100,560,000</b> | <b>127,538,500</b> | <b>29,872,000</b>  | <b>21,600,000</b>  | <b>73,000,000</b>                 | <b>96,600,000</b>  | <b>127,538,500</b> | <b>29,872,000</b>  | <b>14,500,000</b>  | <b>83</b>                                     | <b>96</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>67</b>  | <b>-16</b>            | <b>-16</b> |
| 1 Distribusi Beras Miskin ke Desa/Kelurahan   | 87,600,000              | 100,560,000        | 127,538,500        | 29,872,000         | 21,600,000         | 73,000,000                        | 96,600,000         | 127,538,500        | 29,872,000         | 14,500,000         | 83  | 96         | 100        | 100        | 67         | -16                   | -16        |
| <b>VII. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>   | <b>21,650,000</b>       | <b>139,100,950</b> | <b>113,100,950</b> | <b>97,014,354</b>  | <b>88,750,000</b>  | <b>19,490,000</b>                 | <b>58,470,950</b>  | <b>96,280,950</b>  | <b>90,664,354</b>  | <b>47,550,000</b>  | <b>90</b>                                     | <b>42</b>  | <b>85</b>  | <b>93</b>  | <b>54</b>  | <b>125</b>            | <b>53</b>  |
| 1 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)   | 21,650,000              | 139,100,950        | 113,100,950        | 97,014,354         | 88,750,000         | 19,490,000                        | 58,470,950         | 96,280,950         | 90,664,354         | 47,550,000         | 90  | 42         | 85         | 93         | 54         | 125                   | 53         |

|              |  |                    |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                      |     |     |     |     |     |            |            |
|--------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|
| <b>VIII.</b> | <b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>                               |                    | <b>35,250,000</b>    | <b>33,950,000</b>    | <b>12,250,000</b>    | <b>16,750,000</b>    |                    | <b>33,175,000</b>  | <b>33,800,000</b>    | <b>12,000,000</b>    | <b>15,375,000</b>    | -   | 94  | 100 | 98  | 92  | <b>-8</b>  | <b>-9</b>  |
| 1            | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)   | -                  | 35,250,000           | 33,950,000           | 12,250,000           | 16,750,000           | -                  | 33,175,000         | 33,800,000           | 12,000,000           | 15,375,000           | -   | 94  | 100 | 98  | 92  | -8         | -9         |
| <b>IX.</b>   | <b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>   | <b>79,795,000</b>  | <b>128,736,000</b>   | <b>128,736,000</b>   | <b>155,950,000</b>   | -                    | 50,145,000         | <b>121,142,000</b> | <b>128,736,000</b>   | <b>155,950,000</b>   | -                    | 63  | 94  | 100 | 100 | -   | <b>-4</b>  | <b>17</b>  |
| 1            | Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga / Pekan Olahraga Kabupaten                                    | 79,795,000         | 128,736,000          | 128,736,000          | 155,950,000          | -                    | 50,145,000         | 121,142,000        | 128,736,000          | 155,950,000          | -                    | 63  | 94  | 100 | 100 | -   | -4         | 17         |
| <b>X.</b>    | <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  | <b>3,850,000</b>   | <b>3,850,000</b>     | <b>15,500,000</b>    | <b>9,700,000</b>     | <b>40,106,000</b>    | <b>3,850,000</b>   | <b>3,850,000</b>   | <b>15,500,000</b>    | <b>9,700,000</b>     | <b>40,106,000</b>    | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | <b>145</b> | <b>145</b> |
| 1            | Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan   | 3,850,000          | 3,850,000            | 15,500,000           | 9,700,000            | -                    | 3,850,000          | 3,850,000          | 15,500,000           | 9,700,000            | -                    | 100 | 100 | 100 | 100 | -   | 41         | 41         |
| 2            | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                       | -                  | -                    | -                    | -                    | 40,106,000           | -                  | -                  | -                    | -                    | 40,106,000           | -   | -   | -   | -   | 100 | 0          | 0          |
| <b>XI.</b>   | <b>Program Kerjasama Pembangunan</b>   | <b>9,250,000</b>   | <b>9,000,000</b>     | <b>16,000,000</b>    | <b>10,450,000</b>    | -                    | <b>9,250,000</b>   | <b>9,000,000</b>   | <b>15,100,000</b>    | <b>10,450,000</b>    | -                    | 100 | 100 | 94  | 100 | -   | <b>-15</b> | <b>-16</b> |
| 1            | Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan   | 9,250,000          | 9,000,000            | 16,000,000           | 10,450,000           | -                    | 9,250,000          | 9,000,000          | 15,100,000           | 10,450,000           | -                    | 100 | 100 | 94  | 100 | -   | -15        | -16        |
| <b>XII.</b>  | <b>Program Keagamaan dan Kemasyarakatan</b>  | <b>126,242,200</b> | <b>163,137,000</b>   | <b>175,937,000</b>   | <b>161,819,236</b>   | <b>25,486,602</b>    | <b>83,382,200</b>  | <b>152,637,000</b> | <b>168,397,000</b>   | <b>152,169,238</b>   | <b>25,486,602</b>    | 66  | 94  | 96  | 94  | 100 | <b>-14</b> | <b>0</b>   |
| 1            | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan  | 126,242,200        | 163,137,000          | 175,937,000          | 161,819,236          | -                    | 83,382,200         | 152,637,000        | 168,397,000          | 152,169,238          | -                    | 66  | 94  | 96  | 94  | -   | -18        | -4         |
| 2            | Pelaksanaan event-event keagamaan dan kemasyarakatan   | -                  | -                    | -                    | -                    | 25,486,602           | -                  | -                  | -                    | -                    | 25,486,602           | -   | -   | -   | -   | 100 | 0          | 0          |
| <b>XIII.</b> | <b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>  | <b>59,210,000</b>  | -                    | -                    | -                    | -                    | 50,630,000         | -                  | -                    | -                    | -                    | 86  | -   | -   | -   | -   | <b>-25</b> | <b>-25</b> |
| 1            | Pelayanan E-KTP  | 59,210,000         | -                    | -                    | -                    | -                    | 50,630,000         | -                  | -                    | -                    | -                    | 86  | -   | -   | -   | -   | -25        | -25        |
| <b>XIV.</b>  | <b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>   | -                  | -                    | -                    | <b>4,600,000</b>     | -                    | -                  | -                  | -                    | <b>4,600,000</b>     | -                    | -   | -   | 100 | -   | -   | <b>-25</b> | <b>-25</b> |
| 1            | Pelaksanaan HUT RI di Kecamatan  | -                  | -                    | -                    | 4,600,000            | -                    | -                  | -                  | -                    | 4,600,000            | -                    | -   | -   | 100 | -   | -   | -25        | -25        |
| <b>XV.</b>   | <b>Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>                                      | -                  | -                    | -                    | <b>1,140,138,000</b> | -                    | -                  | -                  | -                    | <b>370,000,000</b>   | -                    | -   | -   | 32  | -   | -   | <b>-25</b> | <b>-25</b> |
| 1            | Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi | -                  | -                    | -                    | 1,140,138,000        | -                    | -                  | -                  | -                    | 370,000,000          | -                    | -   | -   | 32  | 0   | -   | -25        | -25        |
|              |  | <b>623,634,100</b> | <b>1,131,245,899</b> | <b>1,171,885,899</b> | <b>2,288,193,342</b> | <b>1,590,531,242</b> | <b>455,798,100</b> | <b>973,507,400</b> | <b>1,111,630,699</b> | <b>1,459,831,844</b> | <b>1,324,198,644</b> | 73  | 86  | 95  | 64  | 83  | 37         | 37         |

| R2017 | R2018   | R2019 | R2020 | jmlh  | hasil |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 268   | 14      | 31 -  | 16    | 297   | 74    |
| 100   | 276     | 7 -   | 44    | 338   | 84    |
| 71    | 11 -    | 2 -   | 31    | 49    | 12    |
| 657 - | 13      | 18    | 23    | 685   | 171   |
| 106   | 7       | 27    | 36    | 176   | 44    |
| 289   | 39      | 79 -  | 10    | 397   | 99    |
| 54    | 30      | 13 -  | 37    | 61    | 15    |
| 36    | 10 -    | 2     | 4     | 48    | 12    |
| 140   | - -     | 33 -  | 50    | 58    | 14    |
| 183   | 14      | 35 -  | 77    | 154   | 39    |
| 204   | 72      | 57 -  | 51    | 282   | 71    |
|       |         |       |       |       | -     |
| 172 - | 17 -    | 12 -  | 27    | 117   | 29    |
| -     | 100     |       |       | 100 - | 25    |
|       |         |       |       | -     | -     |
|       | 1,021 - | 100   |       | 921   | 230   |
| 70    | 29      | 21    | 61    | 181   | 45    |
| 182 - | 43      | 4 -   | 36    | 106   | 26    |
| 50    | -       | 329 - | 100   | 279   | 70    |
| - 100 |         |       |       | 100 - | 25    |
|       |         |       |       | -     | -     |
| 25 -  | 10      | 15 -  | 100 - | 71 -  | 18    |
| 25 -  | 10      | 15 -  | 100 - | 71 -  | 18    |
|       |         |       |       | -     | -     |
| - 10  | 139     | 5 -   | 88    | 45    | 11    |
| - 10  | 139     | 5 -   | 88    | 45    | 11    |
|       |         |       |       | -     | -     |
|       |         |       |       | -     | -     |
|       |         |       |       | -     | -     |
| 32    | 32 -    | 77 -  | 51 -  | 64 -  | 16    |
| 32    | 32 -    | 77 -  | 51 -  | 64 -  | 16    |
|       |         |       |       | -     | -     |
| 200   | 65 -    | 6 -   | 48    | 211   | 53    |
| 200   | 65 -    | 6 -   | 48    | 211   | 53    |

|     |       |      |      |       |       |
|-----|-------|------|------|-------|-------|
|     |       |      |      | -     | -     |
|     | 2 -   | 64   | 28 - | 34 -  | 9     |
|     | 2 -   | 64   | 28 - | 34 -  | 9     |
|     |       |      |      | -     | -     |
| 142 | 6     | 21 - | 100  | 69    | 17    |
| 142 | 6     | 21 - | 100  | 69    | 17    |
|     |       |      |      | -     | -     |
| -   | 303 - | 37   | 313  | 579   | 145   |
| -   | 303 - | 37 - | 100  | 165   | 41    |
|     |       |      |      | -     | -     |
|     |       |      |      | -     | -     |
| -   | 3     | 68 - | 31 - | 100 - | 66 -  |
| -   | 3     | 68 - | 31 - | 100 - | 66 -  |
|     |       |      |      | -     | -     |
|     | 83    | 10 - | 10 - | 83    | 0     |
|     | 83    | 10 - | 10 - | 100 - | 16 -  |
|     |       |      |      | -     | -     |
|     |       |      |      | -     | -     |
| -   | 100   |      |      | -     | 100 - |
| -   | 100   |      |      | -     | 100 - |
|     |       |      |      | -     | -     |
|     |       |      | -    | 100 - | 100 - |
|     |       |      | -    | 100 - | 100 - |
|     |       |      |      | -     | -     |
|     |       |      | -    | 100 - | 100 - |
|     |       |      |      | -     | -     |
|     |       |      | -    | 100 - | 100 - |
|     |       |      |      | -     | -     |
| 114 | 14    | 31 - | 9    | 150   | 37    |
|     |       |      |      |       | -     |
|     |       |      |      |       | -     |

TABEL 4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| Tujuan   | Sasaran  | Kode | Program dan Kegiatan  | Kinerja   | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan  | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan |               |                |               |        |                |               |                |               |                |               |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD |                |                |
|--|--|------|---|---|--|--|---|---------------|----------------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|----------------|----------------|
|  |  |      |   |   |  |  | 2021  |               | 2022           |               | 2023   |                | 2024          |                | 2025          |                | 2026          |                | Target   | Rp. 000        |                |
|  |  |      |   |   |  |  | Target  | Rp            | Target         | Rp            | Target | Rp             | Target        | Rp             | Target        | Rp             | Target        | Rp             |  |                |                |
| 1  | 2  | 4    | 5   | 7   | 8  | 9  | 10  | 11            | 12             | 13            | 14     | 15             | 16            | 17             | 18            | 19             | 20            | 21             | 22   |                |                |
| Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik | Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan Kecamatan |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA                           |   | Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor  |  | 100%  | 2,756,293,410 | 100%           | 3,625,345,000 | 100%   | 3,609,802,000  | 100%          | 4,047,600,000  | 100%          | 4,434,185,000  | 100%          | 4,628,443,500  | 100%   | 23,101,668,910 |                |
|  |  |      | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |   | Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan   |  | 100%  | -             | 100%           | 23,525,000    | 100%   | 26,500,000     | 100%          | 33,000,000     | 100%          | 38,000,000     | 100%          | 42,000,000     | 100%   | 163,025,000    |                |
|  |  |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Terausuhnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  | 6   | -             | 4 Dokumen      | 8,525,000     |        | 7 Dokumen      | 10,000,000    | 7 Dokumen      | 15,000,000    | 7 Dokumen      | 18,000,000    | 7 Dokumen      | 20,000,000                                     | 7 Dokumen      | 71,525,000     |
|  |  |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 14  | -             | 14 Laporan     | 15,000,000    |        | 14 Laporan     | 16,500,000    | 14 Laporan     | 18,000,000    | 14 Laporan     | 20,000,000    | 14 Laporan     | 22,000,000                                     | 14 Laporan     | 91,500,000     |
|  |  |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD   | Jumlah Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD   |  | 100%  | 2,426,344,000 | 100%           | 2,692,420,000 | 100%   | 2,834,502,000  | 100%          | 3,115,150,000  | 100%          | 3,425,085,000  | 100%          | 3,524,093,500  | 100%   | 18,017,594,500 |                |
|  |  |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |  | 12  | 2,338,564,000 | 22 Orang/Bulan | 2,572,420,000 |        | 22 Orang/Bulan | 2,704,502,000 | 24 Orang/Bulan | 2,980,150,000 | 26 Orang/Bulan | 3,285,085,000 | 26 Orang/Bulan | 3,374,093,500                                  | 26 Orang/Bulan | 17,254,814,500 |
|  |  |      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  | 12  | 87,780,000    | 12 Dokumen     | 120,000,000   |        | 12 Dokumen     | 130,000,000   | 12 Dokumen     | 135,000,000   | 12 Dokumen     | 140,000,000   | 12 Dokumen     | 150,000,000                                    | 12 Dokumen     | 762,780,000    |
|  |  |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN  | Jumlah Pegawai / ASN   |  | 100%  | 14,800,000    | 100%           | 44,700,000    | 100%   | 66,000,000     | 100%          | 70,000,000     | 100%          | 75,000,000     | 100%          | 80,000,000     | 100%   | 350,500,000    |                |
|  |  |      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  |  | 37  | 14,800,000    | 38 Paket       | 24,700,000    |        | 37 Paket       | 46,000,000    | 38 Paket       | 50,000,000    | 38 Paket       | 55,000,000    | 38 Paket       | 60,000,000                                     | 38 Paket       | 250,500,000    |
|  |  |      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   |  | 0   | -             | 4 Orang        | 20,000,000    |        | 4 orang        | 20,000,000                                     | 4 orang        | 100,000,000    |
|  |  |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Cakupan layanan administrasi umum   | Jumlah layanan administrasi umum   |  | 100%  | 128,519,410   | 100%           | 212,200,000   | 100%   | 254,500,000    | 100%          | 287,950,000    | 100%          | 318,100,000    | 100%          | 356,450,000    | 100%   | 1,557,719,410  |                |
|  |  |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                    | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan   |  | 12  | 1,817,039     | 4 paket        | 2,200,000     |        | 10 paket       | 2,500,000     | 10 Paket       | 2,750,000     | 10 paket       | 3,000,000     | 10 Paket       | 3,300,000                                      | 10 Paket       | 15,567,039     |
|  |  |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan   |  | 12  | 17,380,280    | 10 paket       | 20,000,000    |        | 24 Paket       | 30,000,000    | 24 Paket       | 35,000,000    | 24 Paket       | 38,500,000    | 24 Paket       | 42,350,000                                     | 96 Paket       | 183,230,280    |
|  |  |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Tersedianya Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan   |  | 12  | 23,750,000    | 12 paket       | 20,000,000    |        | 12 Paket       | 22,000,000    | 12 Paket       | 24,200,000    | 12 Paket       | 28,000,000    | 12 Paket       | 30,800,000                                     | 878 Paket      | 148,750,000    |
|  |  |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan  |  | 12  | 12,383,091    | 4 paket        | 12,000,000    |        | 6 paket        | 15,000,000    | 6 Paket        | 16,000,000    | 6 Paket        | 17,600,000    | 6 Paket        | 18,000,000                                     | 6 Paket        | 90,983,091     |
|  |  |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan   |  | 12  | 4,800,000     | 12 paket       | 8,000,000     |        | 2 Dokumen      | 10,000,000    | 12 Dokumen     | 10,000,000    | 12 Dokumen     | 11,000,000    | 12 Dokumen     | 12,000,000                                     | 12 Dokumen     | 55,800,000     |
|  |  |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |  | 12  | 68,389,000    | 12 laporan     | 150,000,000   |        | 12 Laporan     | 175,000,000   | 12 Laporan     | 200,000,000   | 12 Laporan     | 220,000,000   | 12 Laporan     | 250,000,000                                    | 90 Laporan     | 1,063,389,000  |

|  |  |                  |  |  |   |   |          |                   |                             |                   |                            |                   |                            |                   |                            |                   |                            |                   |            |                    |
|--|--|------------------|--|--|---|---|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------|--------------------|
|  |  |                  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |  | Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD  |   | 100%     | 10,000,000        | 100%                        | 430,000,000       | 100%                       | 100,000,000       | 100%                       | 125,000,000       | 100%                       | 140,000,000       | 100%                       | 169,000,000       | 100%       | 974,000,000        |
|  |  |                  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan   |   | 0        | -                 | 2 unit                      | 380,000,000       | 1 Unit                     | 40,000,000        | 2 unit                     | 50,000,000        | 2 unit                     | 55,000,000        | 3 unit                     | 75,000,000        | 1 unit     | 600,000,000        |
|  |  |                  | Pengadaan Mebel  | Tersedianya Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang disediakan  |   | 0        | -                 | 2 paket                     | 20,000,000        | 2 Paket                    | 25,000,000        | 3 Paket                    | 35,000,000        | 3 paket                    | 40,000,000        | 3 paket                    | 44,000,000        | 2 Paket    | 164,000,000        |
|  |  |                  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan   |   | 50       | 10,000,000        | 2 unit                      | 30,000,000        | 3 unit                     | 35,000,000        | 5 unit                     | 40,000,000        | 5 Unit                     | 45,000,000        | 5 unit                     | 50,000,000        | 6 Unit     | 210,000,000        |
|  |  |                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |  | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  |   | 100%     | 109,200,000       | 100%                        | 133,000,000       | 100%                       | 218,300,000       | 100%                       | 241,000,000       | 100%                       | 247,500,000       | 100%                       | 259,400,000       | 100%       | 1,208,400,000      |
|  |  |                  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |   | 100      | 1,000,000         | 2 laporan                   | 3,000,000         | 2 Laporan                  | 3,300,000         | 2 Laporan                  | 3,500,000         | 2 Laporan                  | 3,500,000         | 3 Laporan                  | 4,000,000         | 3 Laporan  | 18,300,000         |
|  |  |                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik   | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan  |   | 12       | 27,800,000        | 2 laporan                   | 10,000,000        | 2 Laporan                  | 11,000,000        | 2 Laporan                  | 12,500,000        | 2 Laporan                  | 14,000,000        | 2 Laporan                  | 15,400,000        | 2 Laporan  | 90,700,000         |
|  |  |                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan  |   | 12       | 80,400,000        | 12 laporan                  | 120,000,000       | 12 Laporan                 | 204,000,000       | 12 Laporan                 | 225,000,000       | 12 Laporan                 | 230,000,000       | 12 Laporan                 | 240,000,000       | 12 laporan | 1,099,400,000      |
|  |  |                  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |  | Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara   |   | 100%     | 67,430,000        | 100%                        | 89,500,000        | 100%                       | 110,000,000       | 100%                       | 175,500,000       | 100%                       | 190,500,000       | 100%                       | 197,500,000       | 100%       | 830,430,000        |
|  |  |                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan         | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                      | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya                                    |   | 14       | 58,650,000        | 14 unit                     | 75,000,000        | 14 Unit                    | 85,000,000        | 14 Unit                    | 95,000,000        | 14 Unit                    | 104,500,000       | 16 unit                    | 110,000,000       | 16 unit    | 528,150,000        |
|  |  |                  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara  |   | 1        | 1,230,000         | 2 unit                      | 4,500,000         | 2 Unit                     | 5,000,000         | 2 unit                     | 5,500,000         | 3 unit                     | 6,000,000         | 4 unit                     | 7,500,000         | 2 unit     | 29,730,000         |
|  |  |                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi   |   | 1        | 7,550,000         | 1 unit                      | 10,000,000        | 1 unit                     | 20,000,000        | 2 unit                     | 75,000,000        | 2 unit                     | 80,000,000        | 2 unit                     | 80,000,000        | 2 unit     | 272,550,000        |
|  |  | 07.01.02.        | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   |  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>   | - | <b>0</b> | <b>12,250,000</b> | <b>70.15 Mutu Pelayanan</b> | <b>31,750,000</b> | <b>70.5 Mutu Pelayanan</b> | <b>43,500,000</b> | <b>70.9 Mutu Pelayanan</b> | <b>50,350,000</b> | <b>71.4 Mutu Pelayanan</b> | <b>55,385,000</b> | <b>71.8 Mutu Pelayanan</b> | <b>60,000,000</b> | <b>80</b>  | <b>253,235,000</b> |
|  |  | 07.01.02.2.01    | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  |  | Jumlah Rapat Koordinasi   |   | -        | -                 | 2                           | 15,000,000        | 2                          | 25,000,000        | 2                          | 30,000,000        | 2                          | 33,000,000        | 2                          | 35,000,000        | 2          | 138,000,000        |
|  |  | 07.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |   | -        | -                 | 3 laporan                   | 15,000,000        | 3 Laporan                  | 25,000,000        | 3 Laporan                  | 30,000,000        | 3 Laporan                  | 33,000,000        | 3 Laporan                  | 35,000,000        | 3 Laporan  | 138,000,000        |
|  |  | 07.01.02.2.04    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |  | Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan   |   | 6        | 12,250,000        | 6                           | 16,750,000        | 6                          | 18,500,000        | 6                          | 20,350,000        | 6                          | 22,385,000        | 6                          | 25,000,000        |            | 115,235,000        |
|  |  | 02               | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  | Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan  |   | 2400%    | 12,250,000        | 12 Dokumen                  | 16,750,000        | 12 Dokumen                 | 18,500,000        | 12 Dokumen                 | 20,350,000        | 12 Dokumen                 | 22,385,000        | 12 Dokumen                 | 25,000,000        | 12 Dokumen | 115,235,000        |

|  |   |                |  |  |   |      |            |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |                |
|--|---|----------------|--|--|---|------|------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
|  |   | 07.01.03.      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  |  | <b>Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna</b>   | 100% | 100%       | 2,269,535,000 | 100%                 | 3,957,553,000 | 100%                 | 3,636,638,000 | 100%                 | 3,802,988,000 | 100%                 | 3,971,008,000 | 100%                 | 4,140,795,000 |                      | 21,747,362,000 |
|  |   | 07.01.03.2.01. | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |  | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa   |      |            | 92,535,000    | 10                   | 2,668,015,000 | 10 Kali              | 2,338,500,000 | 10 Kali              | 2,492,350,000 | 10 Kali              | 2,646,620,000 | 10 Kali              | 2,801,282,000 | 10 Kali              | 13,008,147,000 |
|  |   | 01.            | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa  | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  |      |            | -             | 5 Lembaga Masyarakat | 20,000,000    | 5 Lembaga Masyarakat | 22,000,000    | 5 Lembaga Masyarakat | 24,200,000    | 5 Lembaga Masyarakat | 26,620,000    | 5 Lembaga Masyarakat | 29,282,000    | 5 Lembaga Masyarakat | 122,102,000    |
|  |   | 02.            | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |      | 12         | 30,225,000    | 2 Dokumen            | 15,000,000    | 2 Dokumen            | 16,500,000    | 2 Dokumen            | 18,150,000    | 2 Dokumen            | 20,000,000    | 2 Dokumen            | 22,000,000    | 2 Dokumen            | 121,875,000    |
|  |   | 03.            | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |      | 10         | 31,155,000    | 8 Laporan            | 2,633,015,000 | 8 laporan            | 2,300,000,000 | 8 laporan            | 2,450,000,000 | 8 laporan            | 2,600,000,000 | 8 Laporan            | 2,750,000,000 | 8 Laporan            | 12,764,170,000 |
|  |   | 07.01.03.2.02. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |  | Jumlah Program Kerja Kelurahan  |      | 3          | 2,177,000,000 | 2                    | 1,289,538,000 | 2                    | 1,298,138,000 | 2                    | 1,310,638,000 | 2                    | 1,324,388,000 | 2                    | 1,339,513,000 | 2                    | 8,739,215,000  |
|  |   | 02.            | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun  |      | 3 Kegiatan | 1,103,000,000 | 3 unit               | 1,173,138,000 | 4 Unit               | 1,173,138,000 | 2 Unit               | 6,968,690,000  |
|  |   | 03.            | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |      | 363        | 1,074,000,000 | 12 Pokmas            | 116,400,000   | 12 Pokmas            | 125,000,000   | 12 Pokmas            | 137,500,000   | 12 Pokmas            | 151,250,000   | 12 Pokmas            | 166,375,000   | 12 Pokmas            | 1,770,525,000  |
|  |   | 07.01.04.      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   |  | <b>Jumlah Berita Acara/Notulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam</b>  | -    | -          | -             | 6                    | 20,000,000    | 6                    | 24,000,000    | 6                    | 30,000,000    | 6                    | 33,000,000    | 6                    | 40,000,000    | 6                    | 147,000,000    |
|  |   | 07.01.04.2.01. | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  |  | Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban   |      |            |               | 6                    | 20,000,000    | 6                    | 24,000,000    | 6                    | 30,000,000    | 6                    | 33,000,000    | 6                    | 40,000,000    | 6                    | 147,000,000    |
|  |   | 01.            | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah                  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan   |      |            |               | 2 laporan            | 10,000,000    | 2 laporan            | 12,000,000    | 2 laporan            | 15,000,000    | 2 laporan            | 16,500,000    | 2 laporan            | 20,000,000    | 2 laporan            | 73,500,000     |
|  |   | 02.            | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   |      |            |               | 1 laporan            | 10,000,000    | 1 laporan            | 12,000,000    | 1 laporan            | 15,000,000    | 1 laporan            | 16,500,000    | 1 laporan            | 20,000,000    | 1 laporan            | 73,500,000     |
|  | Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) | 07.01.06.      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>  |  | <b>Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi</b>  | 100% |            | 22,270,000    | 100%                 | 75,000,000    | 100%                 | 60,000,000    | 100%                 | 76,000,000    | 100%                 | 97,600,000    | 100%                 | 87,500,000    | 100%                 | 418,370,000    |
|  |   | 07.01.06.2.01. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  |  | Jumlah desa yang difasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan Desa   |      |            | 22,270,000    | 9 Desa               | 75,000,000    | 9 Desa               | 60,000,000    | 9 Desa               | 76,000,000    | 9 Desa               | 97,600,000    | 9 Desa               | 87,500,000    | 9 Desa               | 418,370,000    |
|  |   | 02.            | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |      | 2          | 5,650,000     | 9 Dokumen            | 10,000,000    | 9 Dokumen            | 15,000,000    | 9 Dokumen            | 16,500,000    | 9 Dokumen            | 18,150,000    | 9 Dokumen            | 25,000,000    | 9 Dokumen            | 90,300,000     |
|  |   | 03.            | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   |      | -          | -             | 9 Dokumen            | 10,000,000    | 9 Dokumen            | 15,000,000    | 9 Dokumen            | 16,500,000    | 9 Dokumen            | 18,150,000    | 9 Dokumen            | 20,000,000    | 9 Dokumen            | 79,650,000     |
|  |   | 06.            | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa   | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  |      | -          | -             | 5 Dokumen            | 35,000,000    | -                    | -             | 1 Dokumen            | 10,000,000    | 3 Dokumen            | 25,000,000    | -                    | -             | -                    | 70,000,000     |
|  |   | 15.            | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa   | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |      | 9          | 16,620,000    | 9 Dokumen            | 10,000,000    | 9 Dokumen            | 15,000,000    | 9 Dokumen            | 16,500,000    | 9 Dokumen            | 18,150,000    | 9 Dokumen            | 22,500,000    | 9 Dokumen            | 98,770,000     |

|  |  |     |   |   |   |   |   |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |                |
|--|--|-----|---|---|---|---|---|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
|  |  | 16. | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | - | - | -             | 9 Dokumen | 10,000,000    | 1 Dokumen | 15,000,000    | 1 Dokumen | 16,500,000    | 1 Dokumen | 18,150,000    | 1 Dokumen | 20,000,000    | 1 Dokumen | 79,650,000     |
|  |  |     |   |   |   |   |   | 5,060,348,410 |           | 7,709,648,000 |           | 7,373,940,000 |           | 8,006,938,000 |           | 8,591,178,000 |           | 8,956,738,500 |           | 45,667,635,910 |







**Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan  
Pada Kecamatan Kuala Betara  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| No | Indikator Kinerja Pelayanan   | Interpretasi   | Permasalahan  | Faktor-Faktor Pendukung   |
|----|---|----------------|---|---|
| 1  | 2   | 3              | 4   | 5   |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Sesuai         | Belum tersusunnya SOP Pelayanan, Kurangnya Sarana pendukung seperti alat perangkat lunak (Komputer) dan Kurangnya SDM PNS yang terampil   | 1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah 2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016                               |
| 2  | Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti  | Sesuai         | Kurangnya SDM PNS Kecamatan sehingga untuk penunjukan pengelolaan keuangan pilihan hanya terbatas   | - Batasan waktu tindak lanjut   |
| 3  | Nilai Rata-rata IDM   | sesuai         | - 1 desa belum tercapai dalam pemenuhan komponen- komponen dalam indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Permen desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM<br>- Rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa<br>- Belum optimalnya pemberdayaan potensi yang dimiliki desa untuk membangun dan mengembangkan desa | 1) Dukungan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), 2) Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, 3) Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa |
| 4  | Persentase kehadiran perwakilan desa/kelurahan dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan | Belum Tercapai | Desa/Kelurahan mengirim utusan belum memperhatikan keterwakilan perempuan   | 1) Inpres Nomor 9 Tahun 2000, 2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan PUG di daerah  |
| 5  | Persentase Usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti/dilaksanakan SKPD                               | Belum Tercapai | Walaupun Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan ditindaklanjuti SKPD, namun hanya sebagian kecil yang ditindaklanjuti. Menyebabkan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan  | 1) SIPD, 2) RPJMD, 3) Renstra SKPD  |
| 6  | Persentase sarana dan prasarana publik dibangun termanfaatkan/berfungsi baik                      | Sesuai         | adanya beberapa sarana/prasarana publik yang dalam kondisi kurang baik, namun untuk diperbaiki oleh desa terkendala dengan kepemilikan aset   | 1) UU Desa, 2) Permendesa, 3) Permendagri, 4) Dana Desa, 5) Dana Kelurahan  |

|   |  |        |  |  |
|---|--|--------|--|--|
| 7 | Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti | Sesuai | Tidak adanya dukungan dana operasional dalam penegakan PERDA dan PERKADA | 1) adanya BKTM, Babinsa, 2) adanya pendamping PKH, Satpol PP |
|---|--|--------|--|--|



**CASCADING**

| VISI  | “MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) |  |   |  |   |  |   |   |
|---|--|--|---|--|---|--|---|---|
| MISI  | 2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis   |  |   |  |   |  |   |   |
| Tujuan/Sasaran RPJMD  | Sasaran OPD  | Indikator Sasaran  | Program   | Indikator Program  | Kegiatan  | Indikator Kegiatan   | Sub Kegiatan  | Indikator Sub Kegiatan  |
| Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan  | Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Jumlah Berita Acara/Notulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkompimcam | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum     | Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Unsur Forkopimcam yang terlibat sinergitas harmonisasi tokoh agama dan tokoh masyarakat  |
|   |  |  |   |  |   |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  | Jumlah Rapat Harmonisasi  |
| MISI  | 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik  |  |   |  |   |  |   |   |
| Terseleenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel                         | Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan                   | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah koordinasi  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    | Jumlah Musrenbang   |
|   |  |  |   |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan  | Persentase Pengajuan nonizin yang terselesaikan   |
|   |  | Nilai SAKIP SKPD   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota | Nilai SAKIP SKPD   | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Ranwal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, Renstra, Ranwal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja, Renja |

|  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | Jumlah Dokumen Lakip OPD, LPPK, LPPD   |
|  | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa           | Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)                                    | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase jumlah pemerintahan desa yang tertib administrasi                               | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang difasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  |
|  |  |  |  |  |   |   | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa  | Jumlah desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa  |
|  |  |  |  |  |   |   | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah desa yang difasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          |
|  |  |  |  |  |   |   | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah desa yang difasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
| <b>MISI</b>                                      | <b>5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota</b> |  |  |  |   |   |   |  |
| Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kecamatan                      | Persentase sarana prasarana di Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah koordinasi pemberdayaan desa                                       | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa                           | Jumlah keikutsertaan unsur desa dalam musrenbang setiap desa   |

|  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  |                                 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Kegiatan yang melibatkan pihak pemerintah dan swasta                   |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah desa/kelurahan yang terlaksana pembinaan PKK                           |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |  | Jumlah event olahraga yang dilaksanakan / diikuti                             |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |  | Jumlah event keagamaan yang dilaksanakan / diikuti                            |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |  | Jumlah pendampingan kegiatan stunting   |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |  | Jumlah pendampingan kegiatan KKS  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |  | Jumlah pendampingan kegiatan KLA  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                 |  | Jumlah Da'I, Guru Madrasah, Imam, Mudim dan Guru Ngaji                        |  |
|  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah program kerja kelurahan   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                    | Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun          |
|  |  |  |  |  |  |                                 |  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Jumlah program kerja                               |
|  |  |  |  |  |  |                                 |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan pemberdayaan yang berjalan efektif |

Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| <b>VISI</b>  | <b>"MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024"</b>   |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>MISI</b>  | 2. Cipta kondisi Sosial yang tentram, tertib, dan harmonis                                   |   |   |
| <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN</b>   | <b>STRATEGI</b>   | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>   |
| Terwujudnya kondisi sosial kecamatan yang tentram, tertib dan harmonis | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan   | Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan dan/atau norma yang berlaku | Advokasi Masyarakat, Penegakan Perda  |
|  |  | Meningkatkan koordinasi unsur Forkomincam, Tokoh Agama, dan Masyarakat                              | Penguatan peran unsur Forkomincam, Tokoh Agama dan Masyarakat   |
|  |  |   |   |
|  | 3. Peningkatan tata kelola Pemerintah yang baik  |   |   |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik               | Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan | Penyederhanaan proses pelayanan   | Penyusunan SOP Pelayanan  |
|  |  | Meningkatkan kapasitas SDM Pelayanan  | Pelatihan SDM Pelayanan   |
|  |  | Sarana prasarana pelayanan  | Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan  |
|  |  | Penerapan Teknologi Informasi dalam pelayanan   | Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan   |
|  | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                       | Penguatan Pengawasan dan Pembinaan Kecamatan  | Penguatan peran OPD dalam Pengawasan dan Pembinaan  |
|  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                      | Penguatan peran kelembagaan masyarakat Desa dan Kelurahan   | Penguatan peran PKK, Tokoh Agama, Lembaga Adat, Organisasi Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya |
|  |  |   |   |
|  | 5. Pemerataan Pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota                                    |   |   |
| Terpenuhinya sarana prasarana di kecamatan                             | Meningkatnya sarana dan prasarana kecamatan  | Membangun sarana dan prasarana kecamatan  | Pemenuhan infrastruktur Dasar di Kecamatan  |



| <b>Kondisi Kinerja<br/>pada Akhir Periode<br/>Renstra OPD</b> |
|---|
| <b>Target</b>   |
| <b>10</b>   |
| 71.80%  |
| 60,50 (B)   |
| 0,85  |
| 90%   |
| 100%  |

9 0.222